

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Arah kebijakan dalam GBHN Tahun 1999-2004 dan Undang-Undang No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) menegaskan bahwa penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Dalam kerangka ini, sejumlah upaya telah dilakukan antara lain dengan perbaikan dan pembuatan perangkat peraturan perundang-undangan dalam rangka tata pemerintahan yang baik. Namun disadari bahwa berbagai upaya tersebut belum dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Keberhasilan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik sangat ditentukan oleh keterlibatan dan sinergi tiga aktor utama yaitu aparatur pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, aparatur pemerintah merupakan salah satu aktor penting yang memegang kendali proses berlangsungnya governance. Keterlibatan aparatur pemerintah dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan sangat ditentukan antara lain oleh pemahaman terhadap konsep tata pemerintahan yang baik serta pengamalannya yang sangat terkait dengan birokrasi dan manajemen birokrasi.

Para atasan atau pimpinan sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering pimpinan tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot sehingga instansi pemerintahan menghadapi krisis yang serius. Kesan-kesan buruk organisasi yang mendalam

berakibat dan mengabaikan tanda-tanda peringatan adanya kinerja yang merosot. Pemahaman good governance dalam praktik pemerintahan sehari-hari tentu bukan hal yang mudah. Disamping komitmen yang kuat, pemerintah perlu mengambil dan menggunakan strategi untuk pengembangan praktik good governance.

Tingkat pemahaman aparatur daerah pemerintahan terhadap prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dipengaruhi oleh faktor-faktor, yaitu unit kerja dimana aparat bekerja, masa kerja, pendidikan terakhir, dan jabatan sementara untuk tingkat pemahaman 4 (empat) prinsip utama (akuntabel, transparan, partisipatif, dan supremasi hukum) dipengaruhi oleh faktor-faktor jenis kelamin, jenis unit kerja, pendidikan, dan jabatan.

Para aparatur pegawai negeri sipil yang dituntut mempunyai profesionalisme sesuai dengan tugas jabatannya. Melaksanakan setiap bidang kerja sesuai dengan tugas dan fungsi secara struktural organisasi yang kredibel menjadi salah satu tugas dan kewajiban jabatan yang harus dilaksanakan dengan amanah dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Selain itu pencapaian keberhasilan di dalam mengelola suatu organisasi tidak terlepas dari faktor kepemimpinan dan sikap bawahan dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut (Bastian, 2001).

Performance atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika (Prawirosentono,1999).Perencanaan peningkatan kinerja aparatur perlu dilakukan setiap akan melaksanakan kegiatan. Banyak teknik perencanaan kinerja dalam bentuk teknik analisis manajemen yang dapat membantu aparatur untuk meningkatkan kinerjanya, salah satunya adalah teknik analisis manajemen SWOT dan Pola Kerja Terpadu.

Terkait dengan *good governance*, gaya kepemimpinan (*leadership style*) juga dapat mempengaruhi kinerja. Gaya kepemimpinan (*leadership style*) merupakan cara pimpinan untuk mempengaruhi orang lain atau bawahannya sedemikian rupa sehingga orang tersebut mau melakukan kehendak pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi meskipun secara pribadi hal tersebut mungkin tidak disenangi (Luthans, 2002,575) alberto *et al.* Bahwa kepemimpinan berpengaruh positif kuat terhadap kinerja, juga berpengaruh signifikan terhadap learning organisasi. Temuan ini memberikan sinyal bahwa gaya kepemimpinan seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap kinerja bawahannya, disamping itu untuk mendapatkan kinerja yang baik diperlukan juga pemberian pembelajaran terhadap bawahannya..

Dapat disimpulkan, kinerja aparatur daerah masih kurang memahami prinsip-prinsip *Good Governance* (tata pemerintahan yang baik), Gaya kepemimpinan dan Budaya Organisasi dalam suatu pemerintahan. Penelitian ini

merupakan replikasi dari penelitian Trisnaningsih (2007) yang melakukan penelitian tentang “Independensi Auditor dan Komitmen Organisasi Sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman Good Governance, Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Auditor”. Trisnaningsih (2007) melakukan penelitian tersebut pada kantor Akuntan Publik di Sulawesi. Trisnaningsih (2007) menyimpulkan bahwa 1) Pemahaman Good Governance tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja auditor, melainkan berpengaruh tidak langsung terhadap independensi auditor, 2) Gaya Kepemimpinan berpengaruh langsung terhadap kinerja auditor, tetapi komitmen organisasi bukan merupakan intervening variabel dalam hubungan antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor, 3) Budaya Organisasi tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja auditor, namun secara tidak langsung komitmen organisasi memediasi hubungan antara budaya organisasi terhadap kinerja auditor yang menguji pemahaman good governance, gaya kepemimpinan, budaya organisasi.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu pada waktu dan lokasi serta variabel dependennya. Penelitian ini menggunakan variabel dependen Kinerja Aparatur Daerah Pada SKPD Dinas Kota Binjai tahun 2013. Alasan peneliti mereplikasi penelitian ini adalah karena penulis ingin menguji apakah dengan teori yang sama tetapi lokasi dan waktu serta variabel dependen penelitian yang berbeda akan menghasilkan penelitian yang sama dengan penelitian sebelumnya. Alasan dilakukan penelitian di Kota Binjai dengan waktu penelitian pada tahun 2013 karena Kota Binjai Merupakan salah satu kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan memiliki ragam budaya dan ras di Sumatera utara.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman Good Governance, Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Aparatur Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Binjai)”**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Apakah pemahaman good governance berpengaruh pada kinerja Aparatur daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Binjai)?
2. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh pada kinerja Aparatur daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Binjai)?
3. Apakah budaya organisasi berpengaruh pada kinerja Aparatur daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Binjai)?
4. Seberapa besar pengaruh pemahaman good governance pada kinerjaAparatur daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Binjai)?
5. Seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan pada kinerja Aparatur daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Binjai)?
6. Seberapa besar pengaruh budaya organisasi pada kinerja auditor Aparatur daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Binjai)?

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini di batasi dengan hanya meneliti pengaruh pemahaman good governance, gaya kepemimpinan, budaya organisasi terhadap kinerjaAparatur daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Binjai)?

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman *good governance* berpengaruh pada kinerja Aparatur Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Binjai)?
2. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh pada kinerja Aparatur Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Binjai)?
3. Apakah budaya organisasi berpengaruh pada kinerja Aparatur Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Binjai)?
4. Apakah pemahaman *good governance*, gaya kepemimpinan, budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja Aparatur Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Binjai)?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Pemahaman Good Governance terhadap Kinerja Aparatur Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Binjai).
2. Untuk Mengetahui Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Aparatur Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Binjai).
3. Untuk Mengetahui Budaya Organisasi terhadap kinerja Aparatur Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Binjai).
4. Untuk Mengetahui Pengaruh Pemahaman Good Governance, Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi terhadap Kinerja Aparatur Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Binjai).

1.6 Manfaat Penelitian

a. Bagi peneliti

Untuk Menambah pengetahuan dan mengembangkan wawasan peneliti tentang pengaruh Pemahaman Good Governance, Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi terhadap Kinerja Aparatur Daerah.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam penelitian lebih lanjut.

c. Bagi institusi

Sebagai Bahan Informasi kepada aparatur pemerintahan dalam meningkatkan kinerjanya.